

ANALISIS KEBIJAKAN PEMILIHAN FLEKSIBILITAS MATA PELAJARAN SESUAI DENGAN MINAT DAN BAKAT PESERTA DIDIK

POLICY ANALYSIS ON THE FLEXIBILITY OF SUBJECT SELECTION BASED ON STUDENTS' INTERESTS AND TALENTS

Oleh: M. Rizal Fathoni, Annisa Dwi Nursanti, Suranto, Universitas Negeri Yogyakarta
mrizal.2024@student.uny.ac.id

Abstrak

Kebijakan penjurusan sejak awal jenjang SMA dinilai telah menimbulkan berbagai persoalan, seperti ketidaksesuaian jurusan, menurunnya motivasi belajar, serta ketimpangan dalam akses dan kesiapan antar sekolah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan baru yang tertuang dalam Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024, yang memberikan keleluasaan kepada peserta didik dalam memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan rencana masa depan mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* dan analisis isi terhadap berbagai dokumen kebijakan dan literatur terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki potensi untuk meningkatkan keterlibatan belajar dan pengembangan diri peserta didik, namun di sisi lain masih menghadapi tantangan implementatif, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Diperlukan penguatan kapasitas sekolah berupa sumber daya dan bimbingan serta sinkronisasi lintas jenjang pendidikan agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: fleksibilitas penjurusan, minat dan bakat, kebijakan pendidikan, Kurikulum Merdeka

Abstract

The policy of academic streaming from the beginning of senior high school has been found to cause various issues, such as mismatched subject choices, decreased learning motivation, and disparities in access and preparedness among schools. This study aims to analyze the new policy outlined in the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology Regulation (Permendikbudristek) No. 12 of 2024, which grants students the flexibility to select subjects based on their interests, talents, and future aspirations. This research employs a qualitative approach using library research methods and content analysis of relevant policy documents and literature. The findings indicate that while the policy can potentially enhance student engagement and personal development, it also faces implementation challenges, including limited human resources and supporting infrastructure. Strengthening school capacity through adequate resources, guidance services, and cross-level educational alignment is essential to ensure the policy can be implemented effectively and sustainably

Keywords: subject selection flexibility, interests and talents, education policy, Merdeka Curriculum

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan kompetitif di tengah dinamika global. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan akan sistem pendidikan yang lebih fleksibel dan berpusat pada peserta didik semakin mendesak. Salah satu langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 12 Tahun (2024), yang menekankan pentingnya kebebasan peserta didik dalam memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasi karir mereka.

Permendikbud No. 12 Tahun (2024) menjadi bagian dari implementasi Kurikulum Merdeka, yang mengedepankan pembelajaran berdiferensiasi dan otonomi peserta didik dalam menentukan jalur belajarnya. Dalam kebijakan ini, siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) diberikan keleluasaan untuk memilih mata pelajaran lintas kelompok peminatan, termasuk kombinasi dari rumpun IPA, IPS, dan Bahasa. Hal ini bertujuan untuk mendukung pengembangan potensi secara utuh dan memfasilitasi siswa dalam merancang masa depannya sejak dini (Kemendikbudristek, 2024).

Fleksibilitas pemilihan jurusan diharapkan mampu menjawab tantangan pendidikan di era digital dan ekonomi kreatif yang menuntut kemampuan adaptif dan multidisipliner. Dengan kebijakan ini, peserta didik tidak lagi dibatasi oleh jurusan konvensional, melainkan dapat merancang jalur belajar yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan minat pribadi, sehingga meningkatkan motivasi dan keterlibatan dalam pembelajaran (Wijayanti, 2023).

Namun demikian, penerapan fleksibilitas dalam pemilihan mata pelajaran ini memunculkan sejumlah tantangan (Satori, Meirawan, & Komariah, 2024). Di satu sisi, kebijakan ini membuka ruang eksplorasi dan aktualisasi diri bagi peserta didik. Di sisi lain, sekolah dituntut untuk memiliki kapasitas organisasi, sumber daya guru, dan sistem pendukung yang mumpuni agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara optimal (Walia, 2012). Terdapat pula kekhawatiran akan ketimpangan akses dan kesiapan antar satuan pendidikan, terutama antara sekolah di daerah maju dan tertinggal (Indra, Nazara, Hartono, & Sumarto, 2020).

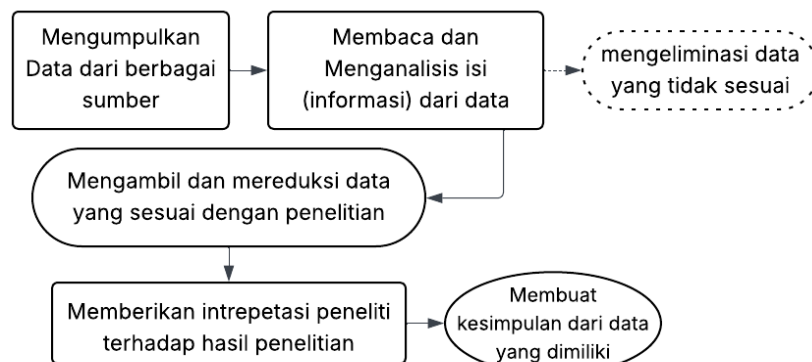
Maka dari itu, analisis terhadap Permendikbud No. 12 Tahun (2024) penting dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan ini benar-benar memberikan fleksibilitas kepada peserta didik dalam memilih mata pelajaran berdasarkan minat dan bakatnya, serta bagaimana kebijakan ini direspons oleh para pemangku kepentingan pendidikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap evaluasi implementasi kebijakan dan rekomendasi perbaikan untuk masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan analisis kebijakan menggunakan pendekatan kualitatif sebagai penelitian kebijakan kualitatif (*qualitative policy research*). Kajian ini bertujuan untuk memahami, mengevaluasi dan menjelaskan kebijakan melalui metode deskriptif dengan desain penulisan *library research* yang melakukan penelusuran terhadap literatur yang selanjutnya dilakukan penelaahan. Khatibah (2011) menjelaskan bahwa *library research* dilakukan dengan menggunakan teknik

tertentu untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penelitian kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan melalui: 1) *Content analysis* yaitu bahasan secara mendalam pada isi informasi yang tertulis dari media masa, 2) Analisis Deskriptif dengan cara data yang diperoleh dari buku dan jurnal dianalisis menggunakan deskriptif secara menyeluruh.

Tahapan penelitian dilakukan dengan mencari berbagai sumber, yang kemudian dilakukan analisis terhadap isi atau informasi dari data. Data yang sesuai akan dilakukan reduksi yang kemudian peneliti memberikan interpretasi terhadap hasil penelitian dan membuat kesimpulan (Gambar 1).



Gambar 1. Alur Penelitian

Prosedur

Analisis dapat dilakukan dengan pengkajian serta penggunaan informasi untuk memperoleh simpulan. Analisis merupakan penyerapan dan kajian serta penggunaan informasi yang bertujuan membuat simpulan (Luankali, 2007). Analisis akan memecah suatu objek yang menggunakan proses kerja dengan tahapan yang disusun secara sistematis. Berdasarkan Suchman (Winarno, 2012) terdapat 6 tahapan yang dapat dilakukan dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan kebijakan atau program
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Analisis terhadap tingkat perubahan yang terjadi
5. Menentukan perubahan yang terjadi akibat dari kebijakan tersebut atau bukan

6. Indikator untuk menentukan keberadaan beberapa dampak

Pada dasarnya, yang dianalisis terhadap kebijakan yang telah dijalankan adalah isi kebijakan, implementasi dan dampaknya terhadap pengguna kebijakan atau masyarakat secara luas. Analisis kebijakan dilakukan bukan cenderung untuk menyetujui atau menolak kebijakan, tetapi mengetahui kecocokan kebijakan dengan kondisi atau masalah yang dihadapi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pendidikan yang berpihak pada potensi, minat, dan bakat peserta didik merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan relevan dengan kebutuhan masa depan. Sejalan dengan semangat transformasi pendidikan yang dicanangkan melalui Kurikulum Merdeka, pemerintah

menerbitkan Permendikbudristek No. 12 Tahun (2024) tentang Kurikulum pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Salah satu poin penting dalam kebijakan ini adalah pemberian fleksibilitas bagi peserta didik dalam memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasi masa depan mereka, khususnya pada jenjang SMA/MA/SMK (Kemendikbudristek, 2024).

Kebijakan ini mencerminkan paradigma baru dalam pendidikan, di mana peserta didik tidak lagi dipandang sebagai objek pembelajaran semata, tetapi sebagai subjek yang aktif dalam menentukan arah belajarnya. Dengan adanya pilihan mata pelajaran yang lebih fleksibel, diharapkan peserta didik dapat mengeksplorasi potensi dirinya sejak dini, meningkatkan motivasi belajar, dan menyiapkan diri secara lebih matang untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi atau dunia kerja.

Namun, implementasi kebijakan ini tentu tidak terlepas dari tantangan di lapangan, mulai dari kesiapan sekolah, tenaga pendidik, hingga sistem pendukung seperti layanan bimbingan konseling dan infrastruktur pembelajaran. Penelitian ini dilakukan analisis terhadap efektivitas dan dampak dari kebijakan tersebut, dengan fokus pada bagaimana fleksibilitas pemilihan mata pelajaran diimplementasikan dan dirasakan oleh peserta didik maupun pendidik berdasarkan 4 aspek, yaitu:

1. Tujuan Kebijakan

Kebijakan pemilihan fleksibilitas mata pelajaran sesuai dengan minat dan bakat peserta didik bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih relevan, inklusif, dan berpihak pada kebutuhan individual peserta didik. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah

meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar dengan memberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk memilih mata pelajaran yang sesuai dengan potensi, minat, serta rencana masa depan mereka (Kemendikbudristek, 2024). Hal ini sejalan dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi dalam Kurikulum Merdeka yang menempatkan peserta didik sebagai pusat proses belajar. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mendorong pengembangan diri siswa secara optimal, menumbuhkan motivasi belajar, serta meningkatkan keterlibatan aktif dalam pembelajaran (Insani & Munandar, 2023).

2. Analisis Terhadap Masalah

Kebijakan penghapusan penjurusan di kelas X SMA sebagaimana tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 12 Tahun (2024) menandai perubahan signifikan dalam sistem pendidikan menengah di Indonesia. Dalam kebijakan ini, seluruh peserta didik di kelas X mengikuti mata pelajaran yang sama tanpa dibagi ke dalam jurusan seperti IPA, IPS, atau Bahasa.

Kebijakan penghapusan penjurusan di kelas X SMA muncul sebagai respons terhadap sejumlah masalah mendasar dalam sistem pendidikan menengah di Indonesia. Salah satu masalah utama yang melatarbelakanginya adalah praktik penjurusan dini yang kerap tidak didasarkan pada pemahaman yang utuh mengenai minat, bakat, dan potensi peserta didik. Pengambilan pilihan dan keputusan oleh siswa terhadap bidang didasarkan atas pemahaman potensi diri dan peluang yang tersedia (Mulyati, 2019). Hal ini sesuai yang disampaikan oleh kepala BSKAP (Badan Standar Nasional Kurikulum dan Asesmen Pendidikan)

Anindito:
“Kebijakan yang merusak.
Akhirnya banyak yang salah
jurusan (kuliah)” (Nurani, 2024)

Selama ini, banyak siswa terpaksa memilih jurusan tertentu, seperti IPA atau IPS, karena tekanan dari orang tua, guru, atau karena pengaruh stereotip sosial yang menganggap jurusan tertentu lebih bergengsi. Akibatnya, tidak sedikit peserta didik yang merasa tidak cocok dengan jurusan yang dipilih, sehingga mengalami penurunan motivasi belajar, kesulitan akademik, dan bahkan krisis kepercayaan diri.

Kebijakan sebelumnya yang menerapkan sistem penjurusan sejak awal masuk kelas 10 menyebabkan labelisasi dan polarisasi antar jurusan. Sistem penjurusan tradisional telah memunculkan anggapan hierarkis bahwa jurusan IPA lebih unggul atau lebih menjanjikan dibandingkan jurusan IPS atau Bahasa. Jurusan IPA lebih berkualitas daripada jurusan lainnya (Mu’awanah & Jacky, 2015). Hal ini tidak hanya berdampak pada persepsi sosial di kalangan siswa dan masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap kebijakan sekolah dalam pengalokasian sumber daya, yang sering kali lebih memprioritaskan jurusan tertentu. Ketimpangan ini menghambat pengembangan potensi siswa secara merata dan bertentangan dengan prinsip keadilan pendidikan.

Sistem penjurusan yang kaku sejak kelas X dianggap menghambat fleksibilitas belajar. Penjurusan masih bersifat kontradiksi dengan undang-undang No. 20 Tahun 2003, karena nyatanya menimbulkan suatu masalah pada siswa (Mu’awanah & Jacky, 2015). Peserta didik yang baru memasuki jenjang SMA sebenarnya masih berada dalam tahap eksplorasi, sehingga seharusnya diberikan ruang untuk mengenal

berbagai bidang ilmu sebelum membuat pilihan yang lebih spesifik. Dengan dihapuskannya penjurusan di kelas X, kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat dasar pengetahuan lintas disiplin dan memberi waktu bagi siswa untuk berkembang secara lebih utuh sebelum memilih mata pelajaran yang sesuai dengan arah minat dan rencana masa depannya di kelas XI dan XII.

3. Standarisasi Kebijakan

Kebijakan tidak adanya penjurusan di kelas X SMA sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 12 Tahun (2024) juga berkaitan erat dengan upaya standarisasi kebijakan kurikulum secara nasional. Selama bertahun-tahun, praktik penjurusan di tingkat SMA telah dilaksanakan dengan cara yang berbeda-beda di tiap satuan pendidikan. Sebagian sekolah menerapkan penjurusan sejak awal masuk kelas X, sementara yang lain menundanya hingga pertengahan semester atau bahkan akhir tahun ajaran. Selain itu, mekanisme penentuan jurusan pun sangat beragam, mulai dari hasil tes akademik, rekomendasi guru, preferensi orang tua, hingga pertimbangan kuota dan fasilitas sekolah. Keadaan bingung membuat siswa salah dalam memilih sekolah dan jurusan, hal ini berdampak pada kurangnya dalam memahami proses belajar (Randi et al., 2019). Variasi ini menimbulkan ketimpangan dalam pengalaman belajar antar peserta didik serta menyulitkan pengawasan dan evaluasi kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Kebijakan ini merupakan bagian dari tahapan sistematis dalam upaya standarisasi kurikulum nasional, khususnya dalam kerangka implementasi Kurikulum Merdeka. Pada kurikulum merdeka siswa

diberikan kesempatan untuk menggali minat dan bakat siswa serta memberikan ruang untuk menentukan mata pelajaran yang diambil (Wisnujati et al., 2021). Dalam kurikulum ini, tahapan pembelajaran di SMA dibagi menjadi tiga fase utama, yaitu Fase E (kelas X) dan Fase F (kelas XI dan XII). Pada Fase E, seluruh peserta didik mengikuti mata pelajaran umum yang sama, tanpa dibedakan berdasarkan jurusan. Perubahan dalam struktur kurikulum pada tingkat SMA tidak adanya program IPA, IPS dan Bahasa (Anggraena et al., 2022). Hal ini bertujuan untuk memberikan landasan pengetahuan dan keterampilan yang merata sebagai bekal sebelum memasuki pembelajaran yang lebih terarah dan pilihan di Fase F. Kebijakan ini dirasakan oleh Kepala Sekolah SMAN 70 Jakarta:

“Sejak kami menerapkan Kurikulum Merdeka, penjurusan itu sudah tidak ada lagi, guru-guru kami jadwalkan sesuai dengan mata pelajaran dan anak-anak kami dampingi” (Aranditto, 2024)

Tahapan ini mencerminkan pendekatan kurikulum yang bersifat bertahap dan adaptif, di mana fase awal menjadi ruang eksplorasi dan penguatan kompetensi dasar. Standarisasi kebijakan ini memastikan bahwa seluruh peserta didik, tanpa memandang latar belakang sekolah atau wilayah geografis, memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh pengalaman belajar yang komprehensif dan berimbang. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menekankan pentingnya pendidikan yang berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh dan berkeadilan. Kebijakan ini sebagai bentuk kebebasan untuk anak dalam

memasuki usia dewasa agar dapat memilih karir yang diinginkan (Chaterine & Meiliana, 2022). Sehingga pada fase F, peserta didik baru memilih mata pelajaran sesuai minat dan rencana kariernya, sehingga proses pemilihan tersebut dilakukan secara lebih sadar, reflektif, dan terinformasi.

4. Tingkat Perubahan dan Dampak Kebijakan

Perubahan sistem jurusan di jenjang SMA membawa dampak yang besar bagi para siswa. Di satu pihak, mereka memperoleh kesempatan lebih luas untuk menggali minat dan potensi diri (Wijayanti, 2023). Namun di pihak lain, mereka juga menghadapi tantangan dalam menentukan pilihan mata pelajaran yang sesuai sejak awal, yang dapat memengaruhi arah pendidikan dan karier mereka ke depan (Sari & Wulandari, 2023). Kebijakan pemerintah terkait fleksibilitas pemilihan mata pelajaran diyakini mampu memperkuat relevansi antara pembelajaran di sekolah dan dunia nyata, sehingga peserta didik lebih siap menghadapi jenjang pendidikan selanjutnya atau dunia kerja yang sesuai dengan minat dan bakat mereka (Putra & Ramadhani, 2022).

Pemilihan yang fleksibel ini disampaikan langsung oleh Kepala BSKAP: *“Pada kelas XI dan XII SMA, murid yang sekolahnya menggunakan Kurikulum Merdeka dapat memilih mata pelajaran secara lebih leluasa sesuai minat, bakat, kemampuan, dan aspirasi studi lanjut atau kariernya (18/7/2024)”* (Aranditto, 2024).

Dengan memberikan pilihan yang lebih personal, kebijakan ini juga berkontribusi dalam pengembangan Profil

Pelajar Pancasila, khususnya dalam dimensi mandiri, kreatif, dan bernalar kritis (Kemendikbudristek, 2022).

Namun demikian, tantangan dalam implementasi kebijakan ini meliputi kesiapan satuan pendidikan dalam menyediakan berbagai pilihan mata pelajaran, ketersediaan guru mata pelajaran yang kompeten, sistem pengelolaan kurikulum yang fleksibel, serta perlunya penguatan layanan bimbingan dan konseling dalam proses pengambilan keputusan oleh siswa. Kebijakan ini menimbulkan dampak yang negatif yaitu dehumanisasi pendidikan yang peserta didik tidak mampu dalam mengembangkan potensinya (Nugraheni et al., 2024).

Kebijakan ini perlu dikaji secara akademik dan menyeluruh, tidak hanya didasarkan pada capaian atau keberhasilan sebagian sekolah yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka. Penilaian yang hanya bersifat praktis dan terbatas berisiko mengabaikan kompleksitas implementasi di berbagai konteks sekolah yang berbeda, termasuk kesiapan tenaga pendidik, sarana prasarana, serta latar belakang sosial ekonomi peserta didik. Selain itu, perubahan sistem berjenjang dalam struktur kurikulum juga harus diperhatikan secara serius karena berpotensi memengaruhi proses transisi ke jenjang pendidikan tinggi.

Ketidaksesuaian antara struktur kurikulum SMA dan sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi dapat menimbulkan kebingungan, kesenjangan informasi, atau bahkan ketidakadilan bagi siswa dalam menentukan pilihan studi lanjutan. Oleh karena itu, sinkronisasi antara kebijakan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi menjadi sangat penting agar kebijakan ini dapat berjalan secara

optimal dan berkelanjutan. Hal ini selaras yang disampaikan oleh perwakilan PGRI:

“Setiap perubahan kebijakan sebaiknya disertai dengan kajian akademik, bukan opini dan asumsi saja. Harus ada pengkajian secara komprehensif agar anak-anak tidak menjadi bahan percobaan” (Aranditto, 2024)

Kemendikbudristek perlu melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap kebijakan ini secara akademik, bukan semata-mata berdasarkan hasil dari sekolah-sekolah yang telah mengadopsi Kurikulum Merdeka. Evaluasi yang komprehensif dibutuhkan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Di samping itu, perubahan dalam sistem berjenjang juga harus dipertimbangkan secara serius, karena akan berpengaruh langsung terhadap proses dan kesiapan siswa saat mendaftar ke perguruan tinggi. Kesesuaian antara kurikulum sekolah menengah dengan sistem seleksi pendidikan tinggi menjadi krusial agar tidak menimbulkan kebingungan ataupun ketimpangan bagi peserta didik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kebijakan pemilihan mata pelajaran berdasarkan minat dan bakat peserta didik merupakan langkah strategis dalam implementasi Kurikulum Merdeka sesuai dengan Permendikbudristek No. 12 Tahun 2012. Kebijakan ini memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan mereka, sehingga diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Standarisasi melalui fase E dan F menyamakan

pengalaman belajar antar sekolah serta mendukung prinsip pembelajaran berdiferensiasi dan profil pelajar Pancasila.

Implementasi kebijakan ini meskipun membawa perubahan positif, masih menghadapi tantangan berupa kebutuhan untuk fasilitas dan sumber daya yang memadai serta pentingnya pendampingan dari pendidik dan orang tua dalam proses pemilihan. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa pemilihan mata pelajaran tidak hanya didasarkan pada keinginan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan dan kemampuan peserta didik untuk menguasai materi yang dipilih.

Secara keseluruhan, kebijakan ini berpotensi besar dalam mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, asalkan didukung oleh perencanaan yang matang, fasilitas yang memadai, dan pendampingan yang efektif.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar sekolah memperkuat kapasitas guru dan layanan bimbingan konseling untuk mendampingi peserta didik dalam memilih mata pelajaran secara tepat. Selain itu, pemerintah perlu memastikan ketersediaan sumber daya yang merata agar fleksibilitas kurikulum dapat diakses secara adil di semua daerah. Bagi peneliti selanjutnya, penting untuk menggali lebih dalam pengalaman siswa dan guru dalam menjalankan kebijakan ini di berbagai tipe sekolah, serta menilai pengaruhnya terhadap kesiapan karier dan capaian belajar peserta didik.

Daftar Pustaka

Anggraena, Y., Felicia, N., Eprijum, D., Pratiwi, I., Utama, B., Alhapip, L., & Widiaswati, D. (2022). *Kajian akademik kurikulum untuk pemulihan pembelajaran*. Pusat Kurikulum Dan

Pembelajaran BSKAP.

<https://repositori.kemdikbud.go.id/24972/>

Aranditto, S. (2024). *Tidak Ada Lagi Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA*. Kompas.

<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/07/18/tidak-ada-lagi-penjurusan-ipa-ips-dan-bahasa-di-sma>

Chaterine, R. N., & Meiliana, D. (2022). *Kurikulum Merdeka, Nadiem Tegaskan Tak Ada Lagi Jurusan IPA-IPS-Bahasa di SMA*. Kompas.Com.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/11/14255221/kurikulum-merdeka-nadiem-tegaskan-tak-ada-lagi-jurusan-ipa-ips-bahasa-di-sma>

Indra, I., Nazara, S., Hartono, D., & Sumarto, S. (2020). Inequality of opportunity among Indonesian school children. *International Journal of Development Issues*, 19, 119-144. <https://doi.org/10.1108/ijdi-06-2019-0098>.

Insani, A., & Munandar, K. (2023). Studi Literatur: Pentingnya Pembelajaran Berdiferensiasi di Era Kurikulum Merdeka untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik. *ScienceEdu*. <https://doi.org/10.19184/se.v6i1.39645>

Kemendikbudristek. (2022). *Profil Pelajar Pancasila*. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kemendikbudristek. (2024). Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah N0.12 Tahun 2024. In *Permendikbud Ristek*.

Khatibah. (2011). Penelitian kepastakaan. *Iqro': Jurnal Perpustakaan Dan Informasi*, 5(01), 36-39. <http://repository.uinsu.ac.id/640/>

Luankali, B. (2007). *Analisis Kebijakan Publik Dalam Proses Pengambilan*

- Keputusan*. Amelia Press.
- Mu'awanah, S., & Jacky, M. (2015). Perang stigma Antara Siswa IPA/IPS di MAN Lasem. *Paradigma*, 03(01). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/10789>
- Mulyati, M. (2019). Menciptakan Pembelajaran Menyenangkan dalam Menumbuhkan Peminatan Anak Usia Dini Terhadap Pelajaran. *STAI Al-Hikmah*, 1(2). https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/85213286/133-libre.pdf?1651307481=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DMenciptakan_Pembelajaran_Menyenangkan_Da.pdf&Expires=1748530693&Signature=g-SDxamzdpXn3wKhJf18ktsMSVg4CaTBKQGhOE7m1E0gUF9f2c3WfEjZE7x~74GOGhVDiLCOvNN95nq51XIRkEnwutVmxOZ0g-XGpsuF6fL2xnntEVt-SI~L~7X3wf7wXhKKJdmm82XHSO6U3TWps3bTLBJoiCTc65bz4-hHMvwPx0GEc8okUHEzVKtncNajOX5I3d4Hr-iHH8IKPYsxqS94Iot7k2QfS18tjMFKPXLw-vIW0zaTNoAbmveeuW9ILEpBWYYyyC3QNjd0VSCMI5YIbB2pV6F7qPf6XOV5tEvjA7ugZkU53lgUG3b4pMNbVqnYVORjFicO0mpQO1r7oQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
- Nugraheni, I., Budiati, A. C., & Nurhadi. (2024). Analisis Strategi Sekolah dalam Melaksanakan Kebijakan Penghapusan Penjurusan di SMA Negeri 3 Surakarta. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v9i3.17440>
- Nurani, S. K. (2024). *Tak Ada Lagi Jurusan IPA dan IPS di SMA, Ini Sistem Penjurusan SMA dari Masa ke Masa*. TEMPO. <https://www.tempo.co/politik/tak-ada-lagi-jurusan-ipa-dan-ips-di-sma-ini-sistem-penjurusan-sma-dari-masa-ke-masa-35767>
- Putra, R., & Ramadhani, N. (2022). Relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja: Studi pada pendidikan menengah. *Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Karier*, 8(1), 15–27.
- Randi, A. F., Astuti, I. F., & Widagdo, P. P. (2019). Implementasi Metode Simple Additive Weighting Dalam Pemilihan SMA dan Jurusan. *Sains, Aplikasi, Komputasi Dan Teknologi Informasi*, 1(1). https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/85876732/pdf-libre.pdf?1652348957=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DImplementasi_Metode_Simple_Additive_Weig.pdf&Expires=1748534993&Signature=LApu0DkgwDN~wib2FJaKBxeN3-gr4d8NcMoLgdiCcr4QqYxs-ZDRrgsvTRDssH1RDmPj8qGKQaxiSfGM1iFFEJLyzd4B2ISol5TORQxh1~wPSKTIoTDplmFeiZA8R9RutG9o~o-luDiUGGwO~oC~nOeDrRg8Yfn5AgV8vqdJwxkv4iYterBfwhfAF8LuFe4HoEuFhJ2enHR6yJb4~xS~ZBn~jiRB0u7WtmjIE1AF6BhlteU8TPKvkTHImmKIf~iNGjEzF5ugAAmoXVGLIeubWhQVQRRxwi1utzCqQbn1-70H~LQHL87zY6zGjZpD4WZUIX6URg2Xwpy~ZmTANgluVg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
- Sari, M., & Wulandari, D. (2023). Peran orang tua dalam mendukung pemilihan jurusan siswa SMA. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 10(2), 60–72.
- Satori, D., Meirawan, D., & Komariah, A. (2024). Model Pengembangan

- Kapasitas Manajemen Sekolah untuk Mendukung Implementasi Kurikulum Fleksibel. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 36(1), 1-15. <https://doi.org/10.17509/jap.v36i1.6443>
- Walia, A. (2024). Flexible in Curriculum to Meet the Objectives of the Program of the Institution. *International Journal For Multidisciplinary Research*. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i02.14660>.
- Wijayanti, S. (2023). Fleksibilitas Kurikulum sebagai Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Masa Kini*, 7(1), 33-44.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi kasus*. CAPS.
- Wisnujati, N. S., Sitorus, E., Anggusti, M., Ramadhani, R., Cendana, W., Marzuki, I., Simarmata, A., Tjiptadi, D. D., Bachtiar, E., & Sari, D. C. (2021). *Merdeka Belajar Merdeka Mengajar*. Yayasan Kita Menulis.